



Women's Education According To Qasim Amin and Its Implications in The Modern Era

Pendidikan Perempuan Menurut Qasim Amin Serta Implikasinya Di Era Modern

Rafi'na Chalatana

Affiliasi:

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Corresponding email:

chalatana41@gmail.com

Abstract

Research Background: This study aims to analyze the concept of women's education proposed by Qasim Amin and its implications in the modern era. Qasim Amin is a reformist thinker from Egypt who is known as a pioneer of the women's emancipation movement in the Islamic world. This research is motivated by the importance of understanding Qasim Amin's thoughts which became one of the milestones in the women's emancipation movement, as well as its relevance in the context of women's education today. This research discusses how the concept and background of women's education thought according to Qasim Amin and how the implications of the concept in the modern era.

Methods: The research methodology used is library research with a descriptive-analytical approach, where data is collected through analyzing the texts of Qasim Amin's works as well as related literature and other documents.

Key findings: The results showed that Qasim Amin emphasized the importance of education as a means of liberating women from social backwardness and achieving equality for women.

Contribution: The implications of the concept of women's education in the modern era can be seen in increasing access to education for women, changing societal attitudes towards the role of women, and gender equality.

Conclusion: This conclusion confirms that Qasim Amin's thoughts on women's education have strong relevance in this modern era.

Keywords: Qasim Amin, women's education, modern era, emancipation.

Abstrak

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan perempuan yang dikemukakan oleh Qasim Amin serta implikasinya di era modern. Qasim Amin adalah seorang pemikir reformis asal Mesir yang dikenal sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan di dunia Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman pemikiran Qasim Amin yang menjadi salah satu tonggak dalam gerakan emansipasi perempuan, serta relevansinya dalam konteks pendidikan perempuan saat ini. Penelitian ini membahas bagaimana konsep dan latar belakang pemikiran pendidikan perempuan menurut Qasim Amin dan bagaimana implikasi konsep tersebut di era modern.

Metode: Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, dimana data dikumpulkan melalui analisis teks-teks karya Qasim Amin serta literatur terkait dan dokumen lainnya.

Temuan utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qasim Amin menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan perempuan dari keteringgalan sosial dan mencapai kesetaraan bagi perempuan.

Kontribusi: Implikasi dari konsep pendidikan perempuan di era modern terlihat dalam peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan sikap masyarakat terhadap peran perempuan, serta kesetaraan gender.

Kesimpulan: kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Qasim Amin mengenai pendidikan perempuan memiliki relevansi yang kuat dalam era modern ini.

Kata Kunci: Qasim Amin, pendidikan perempuan, era modern, emansipasi.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks ini, pendidikan perempuan memiliki posisi yang sangat penting, mengingat perempuan adalah tiang keluarga sekaligus agen perubahan dalam masyarakat. Namun, sepanjang sejarah, perempuan kerap kali mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Marginalisasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan tidak hanya disebabkan oleh factor budaya patriarkal, tetapi juga oleh penafsiran teks-teks agama yang bias gender (Huda, 2020). Padahal secara konseptual, gagasan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah tercermin dalam ajaran Islam, khususnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahkan, penerapan prinsip kesetaraan ini sudah tampak sejak awal perkembangan Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad saw, yang dianggap sebagai periode kehidupan ideal bagi kaum perempuan. Namun, setelah wafatnya Nabi, kondisi perempuan mulai mengalami kemunduran, dan semakin memburuk pada masa kekuasaan dinasti-dinasti Islam. Situasi ini terus berlanjut hingga akhirnya muncul gerakan feminisme di kalangan umat Islam pada abad ke-20 M. Bahkan, periode tahun 2000an, fenomena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki masih terus berlanjut dan nyata.

Dalam sejarah pemikiran Islam modern, isu pendidikan perempuan menjadi salah satu topik sentral yang menandai perubahan sosial dan intelektual di dunia Muslim. Salah satu tokoh penting yang mengusung gagasan pembaruan dalam pendidikan perempuan adalah Qasim Amin, seorang cendekiawan Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 M. Qasim Amin, seorang intelektual Mesir terkemuka abad ke-20 dan tokoh Nahdah, muncul sebagai pelopor advokat emansipasi perempuan di dunia Arab melalui penafsiran ulang ajaran Islam mengenai hak-hak perempuan dan pendidikan (Munfarida 2020). Filosofi

pendidikannya menekankan bahwa perempuan harus menerima pendidikan komprehensif yang mencakup dimensi intelektual, moral, dan fisik, setara dengan pendidikan laki-laki (Siregar 2017). Amin berpendapat bahwa pendidikan perempuan memiliki tiga tujuan penting: partisipasi masyarakat di ruang publik, peningkatan perawatan keluarga dan perlindungan anak, dan pembangunan nasional melalui menghasilkan keturunan yang unggul secara intelektual dan moral (Hizbullah, Muhardinata, dan Nasution 2023). Ide-ide reformisnya menantang praktik patriarki tradisional dengan mengadvokasi kebebasan perempuan untuk bekerja sesuai dengan kodrat dan bimbingan Islam mereka. Pengaruh Amin meluas ke luar Mesir, menginspirasi gerakan feminis di seluruh dunia Arab dan memengaruhi pemikiran pendidikan Islam kontemporer dengan mempromosikan pemikiran demokratis dan nilai-nilai kemanusiaan universal (Tohari dan Cahyani 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Budaya patriarki yang mengutamakan pendidikan anak laki-laki menyebabkan terhambatnya akses pendidikan perempuan, tercermin dari tingkat melek huruf perempuan (83,42%) yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (91,86%) dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan (68,63) versus laki-laki (75,43) (Nursaptini dkk. 2020). Dalam politik, partisipasi perempuan mengalami penurunan 0,9% meskipun pemerintah telah memberikan kuota 30%. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan politik perempuan, kesadaran politik perempuan, minimnya dukungan keluarga, budaya patriarki, dan penafsiran konservasi ajaran agama (Nursyifa dkk. 2023). Faktor lain termasuk minimnya pendidikan politik, kaderisasi partai, persoalan izin pasangan, modal finansial, dan kepercayaan masyarakat (Saputra, Mutiarin, dan Nurmandi 2020). Pendidikan politik responsif gender dan reinterpretasi doktrin agama diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Kajian-kajian yang bersifat empiris menyisahkan ruangan kajian, khususnya kajian teoritis seperti halnya gagasan yang ditawarkan oleh Qasim Amin.

Perempuan yang mendapatkan marginalisasi pendidikan bertentangan dengan gagasan Qasim Amin. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh gagasan pendidikan bagi perempuan yang ditawarkan oleh Qasim Amin sehingga tidak termarginalkan. Untuk mencapai tujuan, artikel ini menggunakan metode *library research* dari tulisan-tulisan buku, artikel dan dokumen yang berkaitan. Setelah data terkumpul, dianalisa dengan pendekatan historis-kontekstual untuk dapat pesan historis serta menjadi solusi pendidikan perempuan yang tidak terbatas waktu dan ruang. Harapannya artikel ini

memberikan kontribusi teoritis kritis untuk menjawab problematika pendidikan perempuan.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Qasim Amin

Qasim Amin lahir di Iskandariah, Mesir, pada bulan Desember tahun 1863. Ayahnya seorang keturunan Turki dan ibunya seorang keturunan Mesir. Qasim Amin memperoleh pendidikan dasarnya di madrasah Ra'su Al-Tin, yang merupakan salah satu madrasah termashur di kota Iskandariyah. Setelah itu Qasim dan keluarganya berpindah tempat tinggal di Kairo sehingga ia meneruskan pendidikannya ke Madrasah al-Tajhiziyah di Hilmiyat dan meneruskan lagi studinya ke Madrasah Al-Huquq atau sekolah tinggi hukum dengan memperoleh gelar *lisançe (lc.)* pada tahun 1881 dengan menempati peringkat pertama, pada usia muda yaitu 18 tahun (Rusli, 2013).

Setelah itu, ayah Qasim mengirimnya untuk belajar di Maktab al-Mahamiy yang dipimpin oleh Musytafa Fahmiy. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Qasim menjabat sebagai Kepala Kementerian selama kurang lebih 18 tahun, sampai Mesir jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian, Qasim menjalin hubungan dekat dengan keluarga Sa'ad Zaglul, hingga akhirnya menikahi putrinya yang bernama Shafiyah. Namun sebelum mereka hidup bersama, Qasim lebih dulu berangkat ke Prancis sebagai delegasi untuk mendalami ilmu hukum dan sistem perundang-undangan, juga mempelajari karya-karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu (Haramain, 2019).

Selama di Paris, Qasim Amin bertemu dengan tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdullah Nadim dan Adib Ishak. Melalui kerja sama Qasim, Jamaluddin dan Abduh mereka mendirikan sebuah media bernama al-'Urwah al-Wutsqa. Melalui media tersebut, mereka menyuarakan ide-ide nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Sekembali dari Paris, Qasim Amin bekerja di Niyabah al-Ammah (Kejaksanaan Agung dan Peradilan). Pada tahun 1892 Qasim juga diangkat sebagai hakim agung di Mahkamah *al-Isti'naf*. Pada tahun 1908 Qasim wafat dalam usia yang terbilang cukup muda yaitu 45 tahun (Rusli, 2013, p. 134).

2. Pemikiran Qasim Amin tentang Pendidikan Perempuan

Pemikiran Qasim Amin tentang emansipasi perempuan muncul dari keprihatinannya terhadap realitas perempuan Mesir yang hidup di bawah dominasi laki-laki dan praktik patriarki tradisional yang dibenarkan atas nama agama (Tohari dan Cahyani 2021). Gagasannya dipengaruhi oleh ajaran Muhammad Abduh, yang mengakui bahwa meskipun Islam memberikan status tinggi kepada perempuan, adat istiadat eksternal telah merendahkan posisi mereka (Haramain 2019). Kerangka intelektual Amin dibentuk oleh

kesenjangan antara cita-cita Islam (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), yang mendorongnya untuk mengadvokasi pembebasan perempuan dari konstruksi sosial diskriminatif berdasarkan gender. Konsep emansipasinya, "Tahrir al-Mar'ah," berfokus terutama pada pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan status dan peran perempuan dalam masyarakat (Siregar 2017). Amin berpendapat bahwa perempuan harus menerima materi pendidikan yang sama dengan laki-laki, termasuk pendidikan jasmani, kesehatan, moral, dan intelektual. Ia percaya bahwa salah satu penyebab utama kemunduran peradaban Islam adalah keterbelakangan kaum perempuannya, dan menekankan bahwa perempuan terpelajar penting tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendidik dasar bagi anak-anak mereka.

Melihat hal ini, Qasim mendorong adanya perubahan dengan memperjuangkan agar perempuan memperoleh hak-hak yang hampir setara dengan laki-laki. Pada masa itu, perempuan hanya memiliki sedikit peluang untuk mengakses pendidikan serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Qasim, agar ketimpangan ini tidak terus berlanjut, sangat penting untuk memberikan pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan (Sihono 2021). Marginalisasi perempuan masih menjadi pembahasan yang penting. Kajian Nursaptini, dkk (2020) menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan (83,42%) yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (91,86%) dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan (68,63) versus laki-laki (75,43). Nilai kuantitatif di atas menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya merdeka.

Qasim Amin meyakini bahwa pendidikan bagi perempuan akan meningkatkan peran perempuan, baik dalam urusan rumah tangga maupun sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Seorang anak, sejak lahir hingga usia sekolah, sebagian besar waktunya dihabiskan bersama ibunya. Anak-anak menghabiskan 60-80% waktunya bersama keluarga hingga usia 18 tahun, menjadikan lingkungan keluarga sebagai fondasi utama bagi pengembangan karakter (Pratiwi 2019). Waktu bersama yang ekstensif ini khususnya penting selama tahun-tahun prasekolah, ketika anak-anak mengalami periode emas perkembangan mereka, yang membutuhkan keterlibatan ibu yang intensif. Hubungan ibu-anak berdampak signifikan pada perkembangan psikologis. Ketika ibu tidak ada, seperti ketika bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, anak-anak menunjukkan perubahan perilaku dan perkembangan yang nyata, meskipun beberapa mengembangkan sifat-sifat positif seperti kemandirian di samping efek negatif seperti jadwal yang tidak teratur (Rohmah 2010).

Bahkan dalam keadaan yang menantang, seperti merawat anak-anak dengan autisme, ibu tetap menjadi pengasuh utama, mengalami stres yang signifikan saat mengelola

kebutuhan kompleks anak-anak mereka sepanjang tahun-tahun sekolah (Chodidjah dan Kusumasari 2018). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya fundamental kehadiran dan keterlibatan ibu selama tahun-tahun formatif anak-anak. Karena itu, seorang ibu perlu memiliki kemampuan mendidik yang baik, sebab ia merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan, maka semakin tinggi pula derajat dan martabat mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, terutama jika pendidikan tersebut juga dibarengi dengan pembinaan akhlak yang baik (Siregar 2016).

Menurut Qasim Amin, menghalangi perempuan untuk memperoleh pendidikan bukan hanya merugikan kaum perempuan secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan tidak pernah melarang perempuan untuk belajar. Bahkan, dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk menuntut ilmu. Namun kenyataannya, pada masa itu, masyarakat Mesir sering kali membatasi akses pendidikan bagi perempuan karena adanya pemahaman agama yang salah serta dominasi budaya patriarki. Qasim Amin menyatakan:

"Jika kita mengakui bahwa perempuan memiliki akal, kebebasan memilih, dan tanggung jawab moral, maka tidak masuk akal jika mereka tidak diberi hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti halnya laki-laki." (Tahrir al-Mar'ah, 1899)

Oleh karena itu, ia menyerukan agar sistem pendidikan dibuka seluas-luasnya bagi perempuan, termasuk dalam pendidikan formal dan agama. Ia juga mengkritik pandangan sempit yang menyatakan bahwa perempuan hanya perlu belajar soal rumah tangga. Bagi Qasim Amin, perempuan harus memiliki kesempatan untuk tumbuh secara intelektual karena mereka memiliki peran penting dalam kemajuan masyarakat. Bagi Qasim, kesetaraan dalam pendidikan tidak hanya berarti perempuan boleh sekolah, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang diterima, kesetaraan kurikulum, serta kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan perempuan juga untuk membentuk perempuan yang cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.

Dalam karya terkenalnya yang berjudul *Tahrir al-Mar'a* (Pembebasan Perempuan), Qasim Amin menyampaikan kritik terhadap aturan-aturan tradisional yang membatasi perempuan, serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan bagi kaum perempuan. Ia juga mendorong terciptanya kesetaraan gender dan mengusulkan perlunya penafsiran ulang terhadap ajaran Islam agar lebih mendukung hak-hak perempuan. Buku

ini menjadi landasan awal bagi munculnya gerakan feminisme di kalangan Muslim dan memberikan inspirasi bagi banyak tokoh feminis Muslim setelahnya (Yurisna Tanjung 2024).

3. Implikasi Pemikiran Qasim Amin

Dalam konteks Era Modern, gagasan emansipasi perempuan menurut Qasim Amin tidak dapat dipisahkan dari peran penting para perempuan terdahulu yang turut memperjuangkan kesadaran keagamaan dan nilai-nilai Islam, sehingga martabat perempuan tetap terjaga. Namun demikian, pada kenyataannya, sebagian perempuan menerima konsep emansipasi secara utuh tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Ide feminisme yang berasal dari Barat dalam gerakan emansipasi perempuan pun sering kali diadopsi tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan norma dan etika dalam pandangan Islam, maka dari itu perlu diperbaharui dan disesuaikan kembali agar sejalan dengan dengan nilai Islam (Cahyani 2021).

Implikasi dari pemikiran Qasim Amin diantaranya adalah banyak negara-negara di dunia yang telah mengadopsi system pendidikan inklusif, dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat dari beberapa negara yang menetapkan pendidikan 12 tahun untuk semua gender, dan dimana seringkali kita mendapati bahwa siswa perempuan lebih dominan dibanding laki-laki dalam sebuah kelas atau sekolah-sekolah. Bahkan di beberapa negara perempuan berpendidikan menduduki posisi penting dalam dunia politik, hukum, ekonomi dan bisnis, misalnya menjadi seorang presiden, Menteri, CEO dan lain sebagainya.

Perempuan telah mencapai posisi kepemimpinan penting di berbagai negara, termasuk sebagai kepala negara dan dalam sektor bisnis serta politik (Rahmayanty, Rabbani, dan Asrofi 2023). Indonesia dan Selandia Baru merupakan contoh negara yang pernah dipimpin perempuan, dengan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin perempuan pertama Indonesia dan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Selandia Baru (Irmalinda dan Magriasti 2022). Australia juga memiliki pengalaman dengan kepemimpinan perempuan melalui Julia Gillard sebagai Perdana Menteri (Utami 2020). Meskipun perubahan sosial dan kesadaran akan keberagaman telah membuka peluang bagi perempuan dalam kepemimpinan, mereka masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan gaji, bias gender, dan diskriminasi (Rahmayanty dkk. 2023; Utami 2020). Faktor pendidikan menjadi determinan penting dalam keterlibatan perempuan di ranah politik dan kepemimpinan.

Melihat dari berbagai sektor di beberapa negara membuktikan bahwa pendidikan perempuan sangat penting untuk kemajuan masyarakat, seperti yang digagas oleh Qasim

Amin diatas. Selain itu pemikiran Qsim Amin menjadi salah satu sumbangsih besar terhadap munculnya Gerakan kesetaraan gender, dalam konteks ini pemikiran Qasim Amin membuka jalan bagi tafsir keagamaan yang lebih progresif dan responsive terhadap hak-hak perempuan. Banyak muncul organisasi-organisasi yang menyerukan kesetaraan gender dalam masyarakat, sebagai bentuk kepedulian sesama perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang setara.

Gerakan feminisme dan organisasi kesetaraan gender di Indonesia muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan gender yang berakar pada budaya patriarki. Revilliano dkk (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi menimbulkan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan, namun saat ini banyak perempuan bangkit menjadi tangguh dan memimpin organisasi. Umriana dkk (2017) melaporkan bahwa melalui dialog warga, kesadaran mengenai hak asasi perempuan dan kesetaraan gender dapat ditingkatkan meskipun masih terdapat diskriminasi, subordinasi, dan beban ganda pada perempuan. Suhada (2021) menekankan bahwa gerakan feminis memerlukan dukungan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan, karena stereotipe patriarki menyulitkan kedua belah pihak. Kencanawati dkk (2025) menganalisis bahwa meskipun ada kemajuan kebijakan, perempuan Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan dalam politik, jabatan eksekutif, dan akses pendidikan yang diperburuk oleh kendala budaya dan struktural, termasuk dampak pandemi COVID-19.

Demikian, emansipasi perempuan yang digagas oleh Qasim Amin pada awalnya muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Namun, dalam perkembangan era modern, gagasan ini sering kali berinteraksi dengan adopsi feminisme Barat secara tidak kritis. Hal ini menimbulkan ketegangan antara upaya memperjuangkan kesetaraan gender dengan norma-norma Islam yang dianut masyarakat. Sebab utama dari ketegangan ini adalah ketiadaan kerangka kritis untuk menyaring konsep eksternal sebelum diintegrasikan ke dalam perspektif keislaman. Akibatnya, esensi pemikiran Qasim Amin—yang menekankan pentingnya menjaga martabat perempuan dalam bingkai etika Islam—sering kali tereduksi menjadi pemahaman bahwa emansipasi identik dengan pelepasan total dari norma agama.

Implikasi dari kondisi tersebut terlihat dalam dua dimensi yang saling berlawanan. Di satu sisi, pemikiran Qasim Amin telah mendorong lahirnya sistem pendidikan inklusif yang memberi kesempatan setara bagi perempuan, sehingga mereka dapat menempati posisi strategis dalam bidang politik, ekonomi, hukum, hingga bisnis. Hal ini terbukti dengan munculnya figur-figur perempuan yang menduduki jabatan kepemimpinan di berbagai negara. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, seperti

ketidaksetaraan upah, bias gender, dan diskriminasi yang berakar pada budaya patriarki. Fakta ini menunjukkan bahwa perluasan akses belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tercapainya kesetaraan substantif, karena hambatan struktural dan kultural masih menjadi tantangan utama.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan gagasan emansipasi dengan nilai-nilai Islam yang progresif dan kontekstual. Pertama, memperkuat pendidikan perempuan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai spiritualitas dan etika Islam. Kedua, mendorong keterlibatan laki-laki dalam gerakan kesetaraan gender guna mengikis stereotipe patriarki yang mengakar. Ketiga, merumuskan kebijakan publik yang sensitif gender dan tetap kontekstual dengan identitas budaya serta nilai agama. Dengan pendekatan ini, visi emansipasi Qasim Amin dapat diwujudkan secara lebih adil, bermartabat, dan berkesinambungan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi transformasi sosial yang berkeadaban.

C. SIMPULAN

Qasim Amin merupakan salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam yang sangat berpengaruh, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Mesir pada akhir abad ke-19. Pemikiran Qasim Amin tentang pendidikan perempuan menjadi gagasan utama dalam perjuangannya. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan derajat dan peran perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam pandangannya, Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menuntut ilmu, bahkan mendorongnya. Oleh karena itu, diskriminasi pendidikan terhadap perempuan yang terjadi pada masa itu dinilai bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Pemikiran Qasim Amin juga memiliki implikasi penting dalam era modern. Banyak negara telah menerapkan sistem pendidikan yang inklusif dan setara bagi perempuan, bahkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan dalam berbagai sektor strategis, seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Hal ini membuktikan bahwa gagasan Qasim Amin relevan hingga kini. Pemikiran Qasim Amin telah memberi dasar bagi gerakan feminisme Islam yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam bingkai ajaran agama. Dengan demikian, kontribusi Qasim Amin terhadap pendidikan dan hak-hak perempuan tidak hanya berpengaruh di zamannya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perjuangan kesetaraan gender yang lebih adil dan manusiawi di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chodidjah, Siti, dan Alfani Prima Kusumasari. 2018. "PENGALAMAN IBU MERAWAT ANAK USIA SEKOLAH DENGAN AUTIS." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 21(2):94–100. doi:10.7454/jki.v21i2.545.
- Fitriya Kencanawati, Achmad Hermawan, Santoso Baihaqi, dan Arumi Nur Septiani. 2025. "KONDISI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 1(4):335–41. doi:10.60145/jdss.v1i4.88.
- Haramain, Muhammad. 2019. "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5(2):218–35. doi:10.31332/zjpi.v5i2.1403.
- Hizbullah, Muhammad, Imam Muhardinata, dan Leni Masnidar Nasution. 2023. "Renewal of Islamic Family Law: Analysis of The Contribution of Qosim Amin's Thought." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17(1):116–26. doi:10.51672/alfikru.v17i1.181.
- Irmalinda, Zikra Putri, dan Lince Magriasti. 2022. "Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2(2):71–76. doi:10.69989/q173s232.
- Muhammad Iqbal Revilliano, Amanda Putri Prasetya, dan Anchella Rizqieka Diva. 2023. "Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 1(2):150–59. doi:10.54066/jmbe-itb.v1i2.173.
- Munfarida, Elya. 2020. "Tafsir Pendidikan Perempuan Menurut Qasim Amin." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5(2):242–53. doi:10.24090/maghza.v5i2.4284.
- Nursaptini, Nursaptini, Muhammad Sobri, Deni Sutisna, Muhammad Syazali, dan Arif Widodo. 2020. "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12(2):16–26. doi:10.35905/almaiyyah.v12i2.698.
- Nursyifa, Alfi, Olpi Tiani Tamala, Ridzikia Zakiah, Shiefa Aprilia Rachamani, dan Siti Mutia Mutmainah. 2023. "Partisipasi Perempuan dalam Politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9(1). doi:10.37058/jipp.v9i1.4120.
- Pratiwi, Ni Kadek Santya Pratiwi. 2019. "PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA SEKOLAH DASAR." *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 3(1):83. doi:10.25078/aw.v3i1.908.
- Rahmayanty, Dinny, Muhammad Naufal Rabbani, dan Fauzan Asrofi. 2023. "Tantangan Dan Peluang Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Berbagai Industri." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5(6):1–5. doi:10.31004/jpdk.v5i6.20181.
- Rohmah, Elfi Yuliani. 2010. "PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK MI/SD: STUDI ATAS DAMPAK KEPERGIAN IBU SEBAGAI TKW KE LUAR NEGERI." *Kodifikasia* 4(1):1–20. doi:10.21154/kodifikasia.v4i1.748.

- Saputra, Herdin Arie, Dyah Mutiarin, dan Achmad Nurmandi. 2020. "Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019." *Muwazah* 12(1):89–110. doi:10.28918/muwazah.v12i1.2502.
- Siregar, Eliana. 2017. "PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6(2):251. doi:10.15548/jk.v6i2.143.
- Suhada, Djilzaran Nurul. 2021. "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3(1):15–27. doi:10.52483/ijsed.v3i1.42.
- Tohari, Achmad, dan Dian Pramodya Cahyani. 2021. "Evaluasi Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita dalam Islam." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11(2):201–16. doi:10.54180/elbanat.2021.11.2.201-216.
- Umriana, Anila, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah. 2017. "PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12(1):41. doi:10.21580/sa.v12i1.1467.
- Utami, Utari Diyarza. 2020. "Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan di Australia." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 4(2):101. doi:10.22303/pir.4.2.2020.101-114.